NOTA KESEPAHAMAN - BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG

PUTUSAN NOMOR 186/HK.01.00/K.LA-09/10/2024, 5 HLM

NOTA KESEPAHAMAN ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG DENGAN KOMUNITAS GARUDA TENTANG PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 DI KABUPATEN TULANG BAWANG.

Abstrak : Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mendukung suksesi Pemilu/Pemilihan tahun 2024, memperkuat peran pengawasan masyarakat, mendorong pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dalam politik, mencegah pelibatan anak dalam kampanye politik praktis, serta memberikan pendidikan politik terkait pengawasan partisipatif di Kabupaten Tulang Bawang. Meliputi sosialisasi dan pengawasan partisipatif pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Tulang Bawang.

: Dasar hukum nota kesepahaman ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2027 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

: PIHAK PERTAMA bertugas merumuskan dan merencanakan berbagai bentuk sosialisasi pengawasan partisipatif serta partisipasi aktif anggota/pimpinan Paguyuban Seni, PIHAK KEDUA bertugas mendorong partisipasi aktif anggota/pimpinan serta melaksanakan kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif di masyarakat. Kemudian dalam pemberian informasi PIHAK KEDUA berhak memberikan informasi maupun laporan hasil investigasi terkait dugaan pelanggaran Pemilu kepada PIHAK PERTAMA. Keikutsertaan PIHAK KEDUA bersifat sukarela, kecuali aktivitas yang teranggarkan dalam DIPA akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA. Nota Kesepahaman inin berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau dihentikan sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Catatan : Nota Kesepahaman ini dibuat oleh pihak pertama Inda Fiska Mahendro, SP., SH. (Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang) Pihak Kedua Nurwan (Ketua Komunitas Garuda) dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024, maka Bawaslu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan.